

“LEGALITAS PEMADAM KEBAKARAN SWADAYA DI KOTA BANJARMASIN MENURUT PERDA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KOTA BANJARMASIN”

Wahyu Maulana¹, Nasrullah², Salafuddin Noor³

¹⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810020

²⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB NIDN. 1112058204

³⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1104017201

Email:wahyumaulana2525@gmail.com

ABSTRAK

Kota Banjarmasin merupakan kota dengan jumlah kejadian kebakaran permukiman tertinggi di Pulau Kalimantan. Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki keterbatasan armada dan anggaran dalam menghadapi risiko kebakaran permukiman. Sehingga masyarakat berusaha menghadapinya sendiri dengan mendirikan Barisan Pemadam Kebakaran swadaya. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dari tataran dogmatik dan teori hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan legalitas dan perlindungan hukum terhadap petugas pemadam kebakaran swadaya menurut perda Nomor 13 tahun 2008. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dukumen, meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek peneltian. Hasil penelitian didapatkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagai pengguna jasa BPK swadaya dalam menghadapi risiko kebakaran di Kota Banjarmasin yaitu: tahap Perencanaan, tahap Pencegahan dan tahap Pelaksanaan dan terakhir tahap Evaluasi. Sedangkan untuk Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Swadaya Menurut Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Bahaya Kebakaran Kota Banjarmasin ada pada bab V tentang Retribusi dan assuransi/santunan Pasal 26 Setiap pemeriksaan alat dan instalasi pemadam kebakaran dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan Setiap anggota BPK yang terdaftar di Dinas diberikan Santunan apabila pada saat bertugas mendapat kecelakaan menuju tempat terjadinya kebakaran (TKK) maupun pada saat pemadaman, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Kata Kunci: Legilitas, Pemdam Kebakaran, Swadaya, dan Perda

ABSTRACT

The city of Banjarmasin is the city with the highest number of residential fires on the island of Borneo. The Banjarmasin City Government has limited fleet and budget in dealing with the risk of residential fires. So that the community tries to deal with it themselves by establishing a self-supporting Fire Brigade. This thesis research is a qualitative research using a normative juridical approach from the dogmatic level and legal theory. The main purpose of this study is to explain the legality and legal protection of independent firefighters according to local regulations No. 13 of 2008. The type of research used in this research is normative legal research. The technique of collecting legal materials used in this research is document study, which includes taking data or documents in the field, either in the form of files or other legal documents at relevant agencies with the object of research. The results of the study found that the forms of community participation as users of independent BPK services in dealing with fire risks in Banjarmasin City were: the Planning stage, the Prevention stage and the Implementation stage and the last stage was the Evaluation stage. As for the legal protection of independent firefighters, according to Regional Regulation Number 13 of 2008 concerning Prevention and Management of Fire Hazards in Banjarmasin City, it is in chapter V regarding levies and insurance/compensation and Each member of the BPK registered with the Office is given compensation if at the time of duty he gets an accident to the place of fire (TKK) or during a fire, which will be further regulated by a Mayor's Decree.

Keywords: Legislature, Firefighters, Self-help, and Perda

Hargiyarto, Putut. "Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran." Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta (2003).
<https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/08/23/hebat-damkar-purna-sakti-berbadan-hukum-dan-punya-legalitas>, diakses pada Jumat, 22 Juli 2022 Pukul: 17.30 wib
<https://berita.banjarmasinkota.go.id/detailpost/hut-damkar-ke-103-wali-kota-banjarmasin-berpesan-utamakan-safety>, diakses pada Jumat, 22 Juli 2022 Pukul: 17.23 wib
<https://lifepal.co.id/media/gaji-pemadam-kebakaran/>, diakses pada Selasa, 06 September 2022. Pukul: 09.35 wib
<https://lifepal.co.id/media/gaji-pemadam-kebakaran/>, diakses pada Selasa, 06 September 2022. Pukul: 09.35 wib
[https://pojokbanua.com/ayō-daftar-dinas-damkar-dan-keselamatan-banjarmasin-bakal-dibentuk/](https://pojokbanua.com/ayो-daftar-dinas-damkar-dan-keselamatan-banjarmasin-bakal-dibentuk/), diakses pada Selasa, 06 September 2022. Pukul: 09.16 wib
Kurnia Ibnu Azhari, Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dalam program neighbourhood development (Studi kasus Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri), Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2011
Muhammad Mahyuni, analisis kebijakan swastanisasi layanan jasa publik pemadam

kebakaran: studi kasus kota banjarmasin (Depok: Universitas Indonesia, 2002), hlm. 2. (29 November 2017).
Rahma safwani, DKK,"Gambaran resiko pekerjaan petugas pemadam kebakaran di dinas pencegahaan pemadam kebakaran (DP2K) kota medan", *jurnal program sarjana fakultas Kesehatan masyarakat universitas Sumatera utara departemen keselamatan dan Kesehatan kerja*, 2012, hlm. 2-4. Dapat di akses online pada <https://www.neliti.com/publications/14642/gambaran-risiko-pekerjaan-petugas-pemadam-kebakaran-di-dinas-pencegah-pemadam-ke.>, 25 Juni 2022, pukul 17.00 wib
Rahmadhani, Musibah Kebakaran Diwarnai Kecelakaan Mobil Pemadam, (Banjarmasin:TribunNews2015), <http://www.tribunnews.com/regional/2015/11/13/musibahkebakaran-diwarnai-kecelakaan-mobil-pemadam>.
Shafwani, Rahmi. 2012. Gambaran Risiko Pekerjaan Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan. Medan: Skripsi USU.
Sumber: data dari Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin.